

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Balai Besar POM Yogyakarta dalam pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya sudah baik namun belum maksimal dilihat dari indikator yang ada yakni produktivitas, responsivitas dan responsibilitas yang diuraikan sebagai berikut.

1. Produktivitas Balai Besar POM Yogyakarta belum maksimal dalam pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator sasaran yang sudah memenuhi target yang direncanakan dan ada pula indikator sasaran yang belum memenuhi target yang direncanakan. Indikator sasaran yang sudah memenuhi target yang direncanakan antara lain sebagai berikut.
 - a. Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa.
 - b. Jumlah produk obat dan makanan yang disampling dan diuji.
 - c. Proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan.
 - d. Proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
 - e. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan.
 - f. Jumlah layanan informasi dan pengaduan.

Sedangkan indikator sasaran yang belum memenuhi target yang direncanakan antara lain sebagai berikut.

- a. Proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat, dan mutu).
 - b. Proporsi obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).
 - c. Proporsi makanan yang memenuhi syarat.
2. Responsivitas Balai Besar POM Yogyakarta sudah cukup baik dalam menampung, merespon, dan menindaklanjuti berbagai pertanyaan, dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Balai Besar POM juga sudah baik dalam menyusun program-program pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Responsibilitas Balai Besar POM Yogyakarta sudah cukup baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program terkait pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Kegiatan/program pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sudah sesuai dengan kebijakan organisasi.

Hambatan internal dan eksternal dialami oleh Balai Besar POM Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hambatan internal yang dihadapi yaitu sumber daya manusia tidak sebanding dengan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi serta kompetensi dan kualitas pegawai Balai Besar POM Yogyakarta belum merata. Sedangkan

hambatan eksternal yang dihadapi yaitu masih rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik serta rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan.

A. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Balai Besar POM Yogyakarta dalam pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya sudah baik namun belum maksimal. Belum maksimalnya pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan implikasi bahwa masih adanya produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan Balai Besar POM Yogyakarta dalam pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya, dengan demikian saran yang diberikan meliputi beberapa hal berikut ini.

1. Balai Besar POM Yogyakarta sebaiknya selalu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi dalam pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya dengan cara meningkatkan kompetensi pegawai terkait kompetensi dalam hal pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kasus

pelanggaran kepada seluruh pegawai Balai Besar POM Yogyakarta sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Perlu adanya pengawasan yang menyeluruh dan lebih ketat dari pihak Balai Besar POM Yogyakarta dalam pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya dengan cara penguatan koordinasi pengawasan dengan instansi-instansi terkait dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten serta membuat undang-undang khusus yang spesifik tentang pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.
3. Balai Besar POM Yogyakarta diharapkan lebih tegas dalam melakukan penindakan hukum bagi para pelanggar dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta memperkuat substansi tuntutan yang dilakukan oleh jaksa kepada pelaku pelanggaran sehingga dapat menghasilkan putusan pengadilan yang lebih tegas. Putusan pengadilan yang lebih tegas tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan.
4. Balai Besar POM Yogyakarta diharapkan lebih mengintensifkan dalam pemberian edukasi kepada produsen maupun konsumen. Pemberian edukasi kepada produsen sebaiknya lebih intensif tentang peyuluhan petunjuk pembuatan obat dan makanan yang baik sehingga produsen mampu membuat produk obat dan makanan yang berkualitas dan bermutu tinggi tanpa harus menambah dengan zat-zat yang merugikan kesehan konsumen. Sedangkan pemberian edukasi kepada masyarakat dimaksudkan agar masyarakat lebih

memiliki kesadaran dan kepekaan dalam menilai dan memilih produk-produk yang beredar di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, dkk, 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah mada University press.
- BBPOM Yogyakarta. 2012. *Evaluasi dan Monitoring Aksi Daerah PJAS Menjadi Pemberitaan Media*. (http://www.pom.go.id/index.php/home/berita_aktual/2302 diakses pada tanggal 1 November 2013 pukul 13.00 WIB).
- Heri Purwata. 2013. *Balai Besar POM Sita Ribuan Obat Tradisional Berbahaya*. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/18/mwgd0c-balai-besar-pom-sita-ribuan-obat-tradisional-berbahaya> diakses pada tanggal 1 November 2013 pukul 14.00 WIB.).
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Kristianto Purnomo. 2009. *YLKI Klaim 30 Persen Produk Makanan Indonesia Bahaya*. (<http://health.kompas.com/read/2009/03/14/15553098/YLKI.Klaim.30.Persen.Produk.Makanan.Indonesia.Bahaya> diakses pada tanggal 1 November 2013 pukul 13.00 WIB).
- Maya Herawati. 2013. *1.732 Item Produk Berbahaya Senilai Rp2 Miliar Dimusnahkan*. (<http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/26/produk-berbahaya-1-732-item-produk-berbahaya-senilai-rp2-miliar-dimusnahkan-420018> diakses pada tanggal 1 November 2013 pukul 14.00 WIB).
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiarto. 2011. *Pemudik Dihimbau Hati-hati Beli Oleh-oleh*. (http://m.suaramerdeka.com/index.php/ramadan/ramadan_news/2011/08/28/94887 diakses pada tanggal 1 November 2013 pukul 13.30 WIB).
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Suyadi Prawirosentono. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Yeremias, T Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

Yuni. 2008. *LKY : BPOM Mesti Beri Sanksi Produsen Nakal* (<http://news.liputan6.com/read/192975/lky-bpom-mesti-beri-sanksi-produsen-nakal> diakses pada tanggal 1 November 2013 pukul 13.50 WIB).